

Pengertian Pembangunan Politik

Drs. Gaul Kadir, M.A.



PENDAHULUAN

Modul pertama ini menguraikan beberapa konsep yang berhubungan dengan konsep pembangunan politik, yaitu perubahan dan modernisasi politik. Selanjutnya dibahas pula konsep pembangunan politik dalam konotasi geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep pembangunan politik berkonotasi ganda sehingga sulit dirumuskan definisi tunggal tentang pembangunan politik yang meliputi seluruh aspek pembangunan politik. Karena itu akan disajikan aneka ragam definisi pembangunan politik. Dari berbagai pemahaman definisi pembangunan politik, dapat dikemukakan bahwa gejala atau ciri utama pembangunan politik, yaitu *equality* (persamaan), *capacity* (kapasitas), dan *differentiation and specialization* (diferensiasi dan spesialisasi).

Materi modul ini merupakan pengantar untuk memahami studi pembangunan politik yang menjadi salah satu bidang kajian Ilmu Politik. Jika anda menguasai modul satu ini maka usaha anda untuk mempelajari modul-modul berikutnya akan menjadi lebih lancar.

Materi modul ini akan membantu Anda untuk menjelaskan berbagai pengertian mengenai pembangunan politik, dengan demikian secara khusus Anda diharapkan bisa menjelaskan tentang:

1. hubungan perubahan, modernisasi dan pembangunan politik;
2. konsep pembangunan politik dalam arti geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional;
3. definisi pembangunan politik;
4. ciri-ciri utama pembangunan politik.

Salah satu perkembangan dalam Ilmu Politik ialah munculnya studi pembangunan politik sebagai bidang kajian tersendiri, di samping bidang kajian lainnya seperti (a) teori-teori politik, (b) lembaga-lembaga politik,

(c) partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, dan (d) hubungan internasional.

Para sarjana Barat mengembangkan kajian ini dalam usaha mereka memahami perubahan sosial politik di negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa di negara-negara tersebut belum berjalan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Hal ini bisa menimbulkan instabilitas politik, yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari negara-negara tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik, supaya kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang.

Di Indonesia, salah satu kenyataan yang memberi harapan, ialah adanya pengakuan resmi bahwa bidang politik termasuk dalam bagian pembangunan nasional. Kesadaran dari elit politik Indonesia untuk mengakui dan memperluas horizon pembangunan ke luar batas-batas pembangunan ekonomi dan berusaha menemukan konsep pembangunan nasional yang menggabungkan aspek-aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam dapat diamati dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas). Gagasan pembangunan politik di Indonesia yang dikembangkan dalam era reformasi dewasa ini, berorientasi pada pembangunan sistem politik dalam arti penataan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kegiatan Belajar 1

Konsep Pembangunan Politik

Dalam studi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik, yaitu perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti, 1992). Perubahan politik dapat diartikan terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik pada periode tertentu ke periode lain atau dari sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila.

Persoalannya ialah, apakah perubahan itu bersifat progresif, yaitu menuju situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, ataukah bersifat regresif yakni menuju situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Sebagai contoh dapat dilihat pada masa pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter ke pemerintahan era reformasi yang cenderung lebih demokratis, di mana kedaulatan rakyat dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan situasi politik yang lebih demokratis daripada sebelumnya yang dapat menjadi prasyarat jalannya proses pembangunan.

Konsep pembangunan mengandung usaha berencana, mempunyai sasaran yang relatif jelas, prosesnya bertahap dan tidak terdapat kekerasan. Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan yang sarannya antara lain mengembangkan kapasitas-kapasitas sistem politik sehingga mampu memelihara dirinya. Selanjutnya modernisasi bisa diartikan sebagai proses perubahan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat hidup sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Karena itu modernisasi mengandung kondisi berupa sistem sosial yang bisa secara terus-menerus berinovasi tanpa mengalami disintegrasi, struktur sosial yang terdiferensiasi dan luwes, serta kerangka sosial yang menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi kehidupan dalam dunia yang secara teknologi sudah maju (After dalam Ramlan Surbakti, 1992). Dengan demikian dapat dipahami bahwa perubahan politik meliputi semua ciri pembangunan dan modernisasi politik yang objeknya antara lain mencakup perubahan sistem nilai politik, struktur kekuasaan dan strategi kebijaksanaan umum.

Di samping itu, konsep pembangunan politik mempunyai konotasi secara geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional (Huntington dan Dominguez dalam Afan Gaffar, 1989). Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya. Itulah sebabnya pembangunan politik cenderung ditujukan untuk negara-negara sedang berkembang atas dasar pandangan bahwa di negara-negara sedang berkembang belum terjadi rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Fenomena ini mengakibatkan timbulnya instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik. Karena itu dilaksanakan pembangunan politik untuk mengatasi permasalahannya.

Pembangunan politik dalam arti derivatif dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. Karena itu pembangunan politik berkaitan erat dengan bidang-bidang pembangunan lain seperti ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Misalnya, keberhasilan pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya peningkatan proses pembangunan politik, demikian pula sebaliknya. Kegagalan pembangunan dalam bidang politik juga akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Begitu pula terjadinya stagnasi pembangunan sosial akan menimbulkan keterbelakangan ekonomi dan politik, sebab dalam kondisi yang demikian masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi ataupun pembangunan politik. Karena itu, pada dasarnya diperlukan keseimbangan tertentu pada semua bidang pembangunan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Tingkat keseimbangan itu ditentukan oleh kondisi-kondisi yang ada dalam masing-masing bidang, dan juga oleh kondisi yang ada di luar setiap bidang. Tidak tercapainya titik kesimbangan itu dengan sendirinya menimbulkan tekanan-tekanan terhadap bidang-bidang tertentu, yang pada akhirnya juga berdampak terhadap sistem secara keseluruhan (Nazaruddin Syamsuddin, 1996).

Pembangunan politik dalam arti teleologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik,

demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. (Huntington dalam Ramlan Surbakti, 1992). Dari lima tujuan pembangunan yang disebutkan Huntington di atas, di Indonesia dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), yaitu mewujudkan kehidupan demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak-hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera. Tujuan-tujuan pembangunan nasional, pada dasarnya dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedangkan pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstutisional. Dalam rangka ini maka MPR dalam era reformasi melakukan amandemen UUD 1945, yang cenderung lebih memperkuat kedaulatan rakyat atau lebih demokratis. Hal ini dapat dilihat pada pasal 6A, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Selain itu pemerintah era reformasi melakukan pada penataan struktur politik maupun infra struktur politik baik supra struktur politik maupun infra struktur politik. Misalnya pada supra struktur politik, dihapusnya DPA, sebagai lembaga tinggi negara dan dibentuknya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di samping Mahkamah Agung dalam tataran kekuasaan yudikatif. Sedangkan pada tataran kekuasaan legislatif dibentuk pula Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersama-sama menjadi anggota MPR. Demikian pula halnya pada infra struktur politik, dikembangkan sistem multi partai yang bebas sehingga pada Pemilu tahun 2004, tampil 24 partai politik peserta pemilu, yaitu: Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, PAN, PBB, PBR, PDS, PKPB, PKPI, PNBK, Partai PP, PNI Marhaenisme, PPNUI, Partai Pelopor, Partai PDI, Partai Merdeka, PSI, PPIB, PPD, dan PBSB. Semua supra dan infra struktur politik tersebut di atas, berperan dalam pembangunan politik di Indonesia.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Buatlah uraian singkat yang menggambarkan hubungan perubahan, pembangunan dan modernisasi politik!
- 2) Jelaskan konsep pembangunan politik dalam konotasi geografis!
- 3) Terangkan konsep pembangunan politik dalam konotasi derivatif dan berilah contoh!
- 4) Uraikan konsep pembangunan politik dalam makna teleologis dan bagaimana penerapannya di Indonesia!
- 5) Terangkan konsep pembangunan politik dalam arti fungsional, berilah contoh!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya. Sedangkan perubahan politik dapat diartikan terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik yang satu ke sistem politik yang lain (Anda masih bisa mengembangkan lebih lanjut jawaban ini).
- 2) Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara maju (Silakan jawaban ini Anda kembangkan).
- 3) Pembangunan politik dalam konotasi derivatif berarti pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh (Anda masih dapat melanjutkan jawaban ini).
- 4) Pembangunan politik dalam makna teleologis berarti pembangunan politik sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan seperti stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi dan sebagainya (Silakan Anda mengembangkan jawaban ini).
- 5) Pembangunan politik dalam makna fungsional dimaksudkan pembangunan politik sebagai suatu gerakan perubahan menuju suatu

sistem politik ideal yang ingin dikembangkan suatu negara. (Anda masih bisa mengembangkan jawaban ini dengan menunjukkan sebuah contoh).



RANGKUMAN

1. Konsep-konsep yang berhubungan dengan konsep pembangunan politik, yaitu:
 - a. perubahan;
 - b. pembangunan;
 - c. modernisasi.

2. Konsep pembangunan politik yang berkonotasi ganda, yaitu:
 - a. geografis;
 - b. derivative;
 - c. teleologis;
 - d. fungsional.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Konsep-konsep lain yang berhubungan dengan konsep pembangunan politik ialah
 - A. produktivitas
 - B. modernisasi
 - C. distribusi
 - D. pembaruan

- 2) Perubahan politik yang menuju kepada situasi yang lebih baik dari sebelumnya adalah perubahan yang bersifat
 - A. dinamis
 - B. radikal
 - C. progresif
 - D. regresif

- 3) Konsep pembangunan mengandung unsur-unsur sebagai berikut
 - A. perincian anggaran
 - B. usaha berencana
 - C. jadwal kegiatan
 - D. jenis kegiatan

- 4) Pembangunan politik dapat dilihat sebagai
- implikasi politik dari pembangunan
 - kelanjutan pembangunan ekonomi
 - peningkatan partisipasi masyarakat
 - perluasan lapangan kerja
- 5) Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti
- bisa menggunakan konsep dan metoda yang telah digunakan negara maju
 - menciptakan sendiri konsep dan metoda baru
 - memodifikasi konsep dan metoda negara maju
 - menghindari konsep dan metoda negara maju

Untuk soal nomor 6-8, pilihlah :

- Jika 1 dan 2 benar
- Jika 1 dan 3 benar
- Jika 2 dan 3 benar
- Jika semuanya benar

- 6) Objek perubahan politik meliputi:
- nilai-nilai politik
 - struktur kekuasaan
 - strategi kebijakan umum
- 7) Menurut Huntington tujuan pembangunan meliputi:
- industri strategis
 - demokrasi
 - stabilitas
- 8) Tujuan Pembangunan Indonesia meliputi:
- keadilan sosial
 - supremasi hukum
 - demokrasi

Untuk soal nomor 9-10, pilihlah:

- Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat
- Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat
- Jika salah satu dari pernyataan tersebut salah
- Jika kedua pernyataan salah

- 9) Pembangunan politik dapat diartikan sebagai implikasi politik dari pembangunan nasional
sebab
pembangunan nasional meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.
- 10) Pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagai gerakan perubahan menuju sistem politik ideal
sebab
sistem politik ideal akan dapat dicapai melalui gerakan radikal.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Definisi Pembangunan Politik

Pada uraian kegiatan belajar pertama telah dikemukakan bahwa konsep pembangunan politik berkonotasi ganda baik secara geografis, derivatif, teleologis, maupun fungsional. Hal ini menyebabkan sulit untuk merumuskan definisi tunggal yang mencakup seluruh aspek dari pembangunan politik.

Apabila Anda menyaksikan sidang-sidang yang berlangsung dalam gedung DPR-MPR maka betapa dinamis diskusi yang dilakukan oleh para wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif itu, sebagai salah satu struktur sistem politik Indonesia. Misalnya saja, melalui sidang umum MPR, yang terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD, para wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum, melantik calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden melalui Bappenas bekerja sama dengan DPR dan DPD merumuskan dan menetapkan Propenas yang mengandung rencana strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada dasarnya Propenas menggambarkan program-program pembangunan nasional yang mengintegrasikan seluruh bidang pembangunan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan-keamanan. Karena itu pembangunan bidang tertentu berkaitan bahkan menjadi prasyarat bagi pembangunan bidang yang lain. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika ada definisi pembangunan politik yang menyatakan pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi dan sebagainya.

Para penulis Indonesia tentang pembangunan politik, seperti Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Dr. Yahya Muhaimin, Dr. Afan Gaffar dan lain-lain, dalam garis besarnya membahas tentang definisi pembangunan politik. Mereka telah mengutip atau menerjemahkan definisi pembangunan politik yang telah dikumpulkan oleh Lucian W. Pye dalam usahanya mengembangkan teori pembangunan politik.

Lucian W. Pye (1966) berhasil menginventarisasi sepuluh definisi mengenai pembangunan politik yang disajikan dalam bukunya yang berjudul

“*Aspects of Political Development*” yang telah diterjemahkan oleh para penulis Indonesia tersebut di atas sebagai berikut:

A. PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRASYARAT POLITIK BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Ketika untuk pertama kalinya perhatian ditujukan pada masalah-masalah pertumbuhan ekonomi dan perlunya mengubah perekonomian yang berjalan lambat menjadi dinamis dan mengandung pertumbuhan yang mandiri maka para ahli ekonomi segera menunjukkan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik dapat memainkan peranan penting dalam menghambat atau memperlancar peningkatan pendapatan per kapita sehingga wajarlah jika pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi (Paul A. Baran, 1957).

Akan tetapi dari segi pelaksanaan, pandangan demikian pada dasarnya cenderung bersifat negatif, sebab lebih mudah menunjukkan pada kita tentang keadaan sistem politik yang menghambat atau menghalangi jalannya pembangunan ekonomi dari pada menjelaskan bagaimana prestasi sistem politik merangsang pertumbuhan ekonomi. Sejarah telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam aneka ragam sistem politik dengan berbagai kebijaksanaan umum yang ditempuh.

Ada beberapa keberatan terhadap pandangan ini, yaitu:

1. Keberatan yang serius terhadap pandangan tentang pembangunan politik seperti tersebut di atas bahwa ia tidak memusatkan perhatiannya pada kerangka dasar teoritis yang bersandar pada asumsi-asumsi umum, sebab dalam beberapa hal, pandangan seperti ini hanya akan berarti apabila pemerintah menempuh kebijaksanaan yang tepat dan secara ekonomis rasional. Sedangkan dalam hal-hal lain pandangan ini akan melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang jauh lebih mendasar tentang organisasi politik masyarakat serta keseluruhan penampilan prestasi masyarakat. Sehingga masalah-masalah pembangunan politik akan menjadi beraneka ragam sesuai dengan masalah-masalah khusus di bidang kehidupan ekonomi.
2. Keberatan lain terhadap pandangan pembangunan politik yang demikian telah makin jelas selama sepuluh tahun terakhir ini, di mana prospek pembangunan ekonomi makin suram di banyak negara-negara miskin. Perekonomian suatu masyarakat berjalan lebih lambat daripada pembangunan politik.

3. Ada pula keberatan bahwa masyarakat di bagian terbesar negara-negara sedang berkembang memiliki perhatian utama yang jauh lebih besar dari pada sekadar kewajiban materil. Mereka kuatir terhadap sikap dan kebijaksanaan dilepaskannya hubungan antara pembangunan politik dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu menghubungkan pembangunan politik semata-mata hanya dengan peristiwa-peristiwa ekonomi akan mengesampingkan banyak hal yang jauh lebih penting di negara-negara sedang berkembang.

B. PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI TIPE POLITIK MASYARAKAT INDUSTRI

Pengertian populer kedua tentang pembangunan politik, juga berhubungan erat dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, berkisar pada pandangan abstrak mengenai ciri khas kehidupan politik yang mendasari masyarakat industri maju. Asumsinya ialah bahwa kehidupan masyarakat industri melahirkan kurang lebih satu tipe kehidupan politik yang dapat ditiru oleh masyarakat manapun, baik yang sudah menjadi masyarakat industri atau belum. Menurut pandangan ini, masyarakat industri, baik yang demokratis maupun yang tidak demokratis, menciptakan rangkaian ukuran tertentu mengenai tingkah laku politik dan penampilannya yang dapat menghasilkan keadaan pembangunan politik dan yang merupakan contoh dari tujuan-tujuan pembangunan bagi sistem-sistem politik lainnya. Walt W. Rostow (1960) menekankan pentingnya hubungan antara tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dengan bentuk-bentuk organisasi politik.

Dengan demikian beberapa ciri khas tentang pembangunan politik menjadi pola-pola tingkah laku pemerintahan yang “rasional” dan “bertanggung jawab”, yaitu penghindaran diri dari tindakan gegabah yang mengancam kepentingan dari golongan masyarakat terhadap kesadaran akan batas-batas kedaulatan politik, penghargaan terhadap nilai-nilai administratif yang teratur dan prosedur hukum serta pengakuan bahwa politik adalah mekanisme pemecahan masalah dan bukanlah suatu tujuan tersendiri, penekanan pada program-program kesejahteraan, dan terakhir pengakuan akan suatu bentuk tertentu dari partisipasi massa.

C. PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI MODERNISASI POLITIK

Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berhubungan erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik identik dengan modernisasi politik. Negara-negara industri maju adalah pencipta mode dan pelopor dalam hampir setiap kehidupan sosial dan ekonomi sehingga wajarlah bila banyak orang mengharapkan bahwa hal seperti itu juga terjadi dalam dunia politik. Tetapi penerimaan yang terlalu mudah atas pandangan seperti ini justru mengundang tantangan dari golongan yang mempertahankan relativisme kebudayaan, yang memperlakukan kebenaran dari identifikasi ciri-ciri masyarakat industri (Barat) yang dipakai sebagai standard universal dan modern bagi setiap sistem politik.

Meskipun demikian, dalam perkembangan sejarah dunia memang bisa ditelusuri pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan maupun norma-norma sosial yang telah menyebar luas ke seluruh pelosok dunia dan oleh masyarakat pada umumnya diakui harus diterima oleh setiap pemerintahan yang ingin dihargai. Banyak dari standar-standar tadi memang berasal dari pertumbuhan masyarakat industri dan perkembangan ilmu dan teknologi, namun sebagian besar kini sudah memiliki dinamikanya sendiri. Partisipasi massa, misalnya, tidak hanya mencerminkan kenyataan-kenyataan sosiologis kehidupan masyarakat industri, tetapi telah juga dipandang sebagai hak mutlak dalam semangat zaman masa kini. Prinsip-prinsip lain seperti tuntutan akan hukum yang berlaku umum, penghormatan atas kemampuan daripada keturunan dan konsep-konsep umum mengenai keadilan dan kewarganegaraan, sekarang nampaknya memperoleh penghargaan yang cukup tinggi dalam setiap kebudayaan sehingga cukup beralasan untuk disebut sebagai standar yang umum bagi kehidupan politik modern. Beberapa sarjana seperti James S. Colman (1960), Seymour Martin Lipset (1959) dan Karl W. Deutsch (1961) telah berusaha mengumpulkan indeks-indeks perubahan sosial dan ekonomi serta menghubungkannya dengan pembangunan politik, terutama pembinaan demokrasi.

Pertanyaan yang segera timbul adalah apakah yang merupakan bentuk dan isi pokok dari pandangan mengenai pembangunan politik. Apakah ukuran dari pembangunan itu adalah kemampuan suatu negara untuk membentuk alat-alat kebudayaan modern seperti partai politik, pemerintahan sipil yang rasional dan badan legislatif yang berwibawa? Jika memang demikian maka masalah etnosentrisme akan jadi relevan, karena sebagian besar lembaga-lembaga itu benar-benar berciri kebudayaan Barat. Di lain

pihak, seandainya ukuran itu dipusatkan pada prestasi beberapa fungsi substantif maka akan timbul kesulitan-kesulitan lain dalam setiap sistem politik. Sebab ditinjau dari segi sejarah, semua sistem politik telah melakukan fungsi-fungsi yang diharapkan dari lembaga-lembaga modern yang Barat itu. Jadi apakah yang membedakan sesuatu lebih atau kurang maju? Jelaslah bahwa masalah pembangunan politik jika semata-mata dipandang sebagai modernisasi politik akan menghadapi kesulitan dalam membedakan apa yang Barat dan apa pula yang modern. Agar supaya usaha pembedaan itu dapat dilakukan maka ukuran-ukuran tambahan perlu dimasukkan.

D. PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI OPERASI NEGARA-BANGSA

Sampai tingkat tertentu, semua keberatan di atas dapat ditampung oleh pendapat bahwa pembangunan politik terdiri atas pengorganisasian kehidupan politik dan prestasi fungsi-fungsi politik sesuai dengan standar yang diharapkan dari negara bangsa. Menurut pandangan ini ada asumsi bahwa secara historis telah ada bermacam-macam jenis sistem politik dan setiap kelompok masyarakat memiliki corak politiknya masing-masing, tetapi dengan lahirnya negara bangsa yang modern, timbullah serangkaian persyaratan mengenai kehidupan politik sehingga bila suatu masyarakat ingin berprestasi sebagai negara modern maka semua lembaga-lembaga politik dan praktek penerapannya harus disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan tersebut. Politik dari kerajaan-kerajaan lama, masyarakat kesukuan dan marga serta tanah jajahan haruslah memberikan jalan bagi kehadiran negara bangsa yang modern dan bisa bekerja efisien dan efektif dalam suatu sistem di lingkungan negara-negara bangsa lain.

Dengan demikian pembangunan politik menjadi suatu proses melalui mana masyarakat-masyarakat yang merupakan negara bangsa dalam bentuk dan berdasarkan pengakuan internasional menjadi negara bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Jelasnya, hal ini melibatkan pembinaan kemampuan untuk mempertahankan suatu tingkat ketertiban umum tertentu, memobilisasi semua sumber-sumber dalam usaha bersama, serta membuat dan memenuhi secara efektif semua persetujuan-persetujuan internasional. Jadi, ukuran pembangunan politik akan meliputi: pertama, pembentukan serangkaian lembaga-lembaga politik tertentu yang merupakan prasarana penting bagi suatu negara bangsa. Kedua, pengungkapan secara tertib semua gejala-gejala

nasionalisme ke dalam tatanan kehidupan politik. Sehingga bisa dikatakan bahwa pembangunan politik adalah politik nasionalisme yang dijalankan dalam kerangka lembaga-lembaga kenegaraan. Para sarjana seperti KH. Silvert (1964), Edward Shills (1962) dan William Maccord (1965) menggunakan pendekatan semacam ini.

Penting ditekankan bahwa dari sudut pandang ini nasionalisme adalah persyaratan penting tetapi masih kurang memadai untuk dapat menjamin pelaksanaan pembangunan politik. Pembangunan meliputi serangkaian usaha penterjemahan perasaan-perasaan nasionalisme yang simpang siur menjadi semangat kewarganegaraan, dan usaha pembentukan lembaga-lembaga negara yang dapat menampung aspirasi masyarakat ke dalam kebijaksanaan dan program-program. Singkatnya, pembangunan politik adalah pembinaan bangsa.

E. PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DAN HUKUM

Apabila pembinaan bangsa, kita bagi menjadi pembinaan lembaga-lembaga dan pembinaan kewarganegaraan maka kita akan mendapatkan dua konsep pembangunan politik yang sangat umum. Sesungguhnya, konsep pembangunan politik sebagai pembinaan organisasi memiliki sejarah yang panjang dan menekankan kebenaran dari falsafah kolonial yang liberal. Sebab seperti yang telah kita ketahui dalam sejarah pengaruh Barat terhadap bagian dunia lain, salah satu tema utama adalah kepercayaan bangsa-bangsa Eropa bahwa dalam membina masyarakat-masyarakat politik adalah mutlak untuk menciptakan tatanan hukum dan tatanan administrasi.

Tradisi ini memperkuat teori-teori masa kini yang menyatakan bahwa pembinaan birokrasi yang efektif harus mendapatkan prioritas utama dalam proses pembangunan. Menurut pandangan ini pembangunan administrasi erat kaitannya dengan penyebaran rasionalitas, makin kuatnya konsep-konsep hukum sekuler, dan peningkatan pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengaturan kehidupan manusia. (Max Weber, 1947 dan Joseph La Palombara, 1964).

Dengan sendirinya, tidak ada negara yang bisa disebut “maju” jika negara itu tidak memiliki kemampuan menangani masalah-masalah kemasyarakatan secara efektif. Biasanya negara-negara baru memiliki lembaga-lembaga administratif yang mampu menangani banyak masalah. Di

lain pihak administrasi saja tidaklah cukup. Bahkan jika administrasi terlalu dipandang amat penting, ketimpangan-ketimpangan bisa timbul dan menghambat pembangunan politik. Terutama konsep pembangunan politik yang hanya diartikan sebagai perbaikan administrasi akan mengabaikan pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi yang merupakan aspek-aspek penting pembangunan politik.

F. PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI MOBILISASI DAN PARTISIPASI MASSA

Aspek lain dari pembangunan politik terutama mengenai peranan warga negara dan standar-standar baru di bidang kesetiaan dan keikutsertaan rakyat. Mudah dimaklumi jika di negara-negara bekas jajahan, pembangunan politik diartikan sebagai suatu bentuk kesadaran politik di mana bekas rakyat yang terjajah menjadi warga negara yang aktif dan penuh cita-cita.

Di beberapa negara pandangan demikian diterapkan secara ekstrim sehingga segi-segi efektivitas dan demonstrasi massa dianggap satu-satunya tujuan; para pemimpin maupun warga negara merasa bahwa mereka sedang memajukan pembangunan nasional melalui intensitas dan seringnya perasaan politik massa dalam demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan. Sebaliknya, beberapa yang sedang menjalankan kemajuan secara teratur dan efektif akan merasa tidak puas bila mereka merasa bahwa tetangga-tetangganya sedang mengalami “pembangunan” yang lebih besar. (Clifford Geertz, 1963 dan Rupert Emerson, 1960).

Menurut pandangan bagian terbesar orang, pembangunan politik memang mencakup perluasan partisipasi massa, tetapi sangat penting dibedakan kondisi-kondisi yang memungkinkan perluasan itu. Menurut sejarah, di negara-negara Barat dimensi pembangunan politik erat bertalian dengan perluasan hak memilih dan diperkenalkannya unsur-unsur baru dari masyarakat ke dalam proses politik. Proses partisipasi massa ini berarti penyebarluasan proses pengambilan keputusan, dan partisipasi itu mempunyai pengaruh terhadap pilihan dan keputusan. Tetapi di beberapa negara baru partisipasi massa itu belum diimbangi dengan proses pemilihan yang memadai, bahkan hanya sekadar bentuk baru dari tanggapan rakyat terhadap manipulasi golongan elit. Memang harus diakui bahwa partisipasi terbatas seperti itu memainkan peranan dalam pembinaan bangsa karena turut menciptakan kesetiaan baru dan perasaan identitas nasional baru.

Dengan demikian, proses partisipasi massa adalah bagian penting dari pembangunan politik, di mana ia selalu berhadapan dengan berbagai hambatan emosionalisme yang kaku ataupun penghasut-penghasut yang membahayakan. Keduanya dapat menguras habis sumber daya masyarakat. Masalahnya memang merupakan persoalan klasik tentang bagaimana mencari keseimbangan antara aspirasi rakyat dengan pemeliharaan ketertiban umum, itulah merupakan masalah dasar demokrasi. (Edward Shills dalam Lucian W. Pye, 1963)

G. PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PEMBINAAN DEMOKRASI

Uraian di atas membawa kita pada pandangan bahwa pembangunan politik adalah seharusnya sama dengan usaha pembentukan lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi. Dalam pandangan banyak orang tersimpul anggapan bahwa pembangunan politik yang sungguh-sungguh bermakna adalah pembinaan demokrasi. Malah ada orang yang menekankan pentingnya hubungan ini dan berpendapat bahwa pembangunan baru berarti jika dikaitkan dengan suatu ideologi tertentu, apakah itu demokrasi, komunisme atau totalitarisme. Menurut pandangan ini, pembangunan hanya mempunyai makna bila ditujukan untuk memperkuat serangkaian nilai-nilai tertentu. Berpura-pura bahwa keadaan ini bisa dikesampingkan atau dihindari hanyalah merupakan penipuan diri sendiri.

Sekalipun banyak ditemukan contoh-contoh jelas yang menyamakan demokrasi dengan pembangunan, banyak timbul tantangan dalam ilmu-ilmu sosial terhadap pendekatan demikian itu. Menggunakan pembinaan demokrasi sebagai kunci pembangunan politik dapat dipandang sebagai suatu usaha memaksakan kepada bangsa lain nilai-nilai Barat.

Masalah hubungan antara demokrasi dengan pembangunan politik sangat rumit untuk dibahas dalam pandangan umum mengenai sikap-sikap yang berbeda-beda. Untuk sementara agaknya perlu diperhatikan bahwa banyak orang berpendapat bahwa secara asasi pembangunan berbeda dengan demokrasi, dan justru usaha untuk memperkenalkan demokrasi dapat menjadi hambatan bagi pembangunan.

H. PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI STABILITAS DAN PERUBAHAN TERATUR

Banyak orang merasa bahwa demokrasi tidak sesuai dengan pembangunan. Mereka memandang bahwa pembangunan hampir seluruhnya sebagai proses ekonomi dan proses tertib sosial. Komponen politik dari pandangan seperti ini biasanya berpusat pada stabilitas politik yang didasarkan pada kemampuan melaksanakan perubahan secara tertib dan terarah. Stabilitas yang hanya merupakan stagnasi dan dukungan sepihak terhadap status quo jelas bukan pembangunan, kecuali jika pilihannya penciptaan keadaan yang lebih buruk. Tetapi stabilitas dapat dihubungkan dengan pembangunan dalam arti bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada suatu lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian dan perencanaan yang didasarkan pada prediksi yang cukup aman (Karl W. Deutsch, 1963).

Pandangan ini bisa diatasi pada bidang politik karena suatu masyarakat yang proses politiknya secara rasional dan terarah mampu melaksanakan dan mengendalikan perubahan sosial, dan bukan hanya menanggapi saja, jelas lebih “maju” daripada masyarakat di mana proses politiknya menjadi korban kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang mengendalikan nasib rakyatnya. Karena itu, sebagaimana beberapa orang telah berargumentasi bahwa dalam masyarakat modern manusia menguasai alam demi tujuannya, sedangkan dalam masyarakat tradisional manusia hanya menyesuaikan diri terhadap kehendak alam, kita dapat memandang bahwa pembangunan politik tergantung pada kemampuan untuk mengendalikan atau dikendalikan oleh perubahan sosial. Sudah barang tentu pangkal tolak pengendalian kekuatan-kekuatan sosial adalah kemampuan memelihara ketertiban.

Keberatan terhadap pandangan pembangunan seperti ini ialah banyak persoalan yang tak terjawab, seperti misalnya berapakah kadar ketertiban yang diperlukan atau diinginkan dan untuk tujuan apakah perubahan sosial itu dilakukan. Juga, apakah menghubungkan stabilitas dengan perubahan adalah sesuatu yang hanya terjadi dalam impian orang-orang kelas menengah, atau setidak-tidaknya dalam masyarakat yang jauh lebih baik keadaannya dari pada masyarakat yang terbelakang. Akhirnya, menurut skala prioritas ada perasaan bahwa pemeliharaan ketertiban adalah suatu hal yang diperlukan dan diinginkan, tetapi ia hanya menempati urutan kedua, setelah

kemampuan untuk bertindak menjalankan tugas-tugas. Karena itu, pembangunan menuntut pandangan yang lebih luas dan positif terhadap tindakan dan pelaksanaan.

I. PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI MOBILISASI DAN KEKUASAAN

Kesadaran bahwa sistem politik harus dapat memenuhi persyaratan ukuran prestasi tertentu dan bermanfaat bagi masyarakat membawa kita pada pandangan pembangunan politik sebagai kemampuan sebuah sistem. Jika dikatakan bahwa demokrasi bisa mengurangi efisiensi suatu sistem maka tersirat anggapan bahwa efisiensi suatu sistem dapat diukur, dan selanjutnya efisiensi itu akan menghasilkan model-model teoritis untuk menguji kenyataan.

Pandangan ini menyimpulkan bahwa sistem politik dapat dinilai dari batasan dan tingkat kekuasaan yang bisa dimobilisasi oleh sistem itu. Beberapa sistem yang dapat atau yang tidak dapat menciptakan stabilitas nampaknya akan berjalan dengan kadar kekuasaan yang minim sekali sehingga para pengambil keputusan yang berwewenang hampir tak berdaya sama sekali memprakarsai dan menyelesaikan sasaran-sasaran kebijaksanaan umum. Dalam masyarakat lain para pengambil keputusan memiliki cukup banyak kekuasaan sehingga masyarakat bisa mencapai sasaran-sasaran bersama yang lebih luas. Negara-negara secara alamiah memang berbeda menurut basis sumber-sumber daya yang dimilikinya. Tetapi ukuran pembangunan adalah kadar kemampuan memanfaatkan secara maksimal dan mewujudkan dalam kenyataan potensi penuh sumber-sumber yang ada.

Perlu diperhatikan bahwa hal ini tidak dengan sendirinya mengacu pada suatu pandangan tentang pembangunan yang otoriter bahwa pembangunan adalah sekedar kemampuan pemerintah mengerahkan sumber-sumber dari masyarakat. Kemampuan untuk memobilisasi dan mengalokasikan sumber-sumber itu biasanya sangat dipengaruhi oleh dukungan rakyat yang diperintah, inilah sebabnya mengapa sistem demokratis seringkali bisa memobilisasi sumber-sumber masyarakat secara lebih efisien daripada sistem otoriter yang represif. Bahkan secara praktis masalah pencapaian tujuan pembangunan politik di banyak masyarakat terutama sekali menyangkut masalah bagaimana memperoleh dukungan rakyat yang lebih besar, ini bukan

karena nilai mutlak dari demokrasi melainkan karena kesadaran sistem itu bisa mencapai tingkat mobilitas kekuasaan yang lebih tinggi.

Jika pembangunan politik dipandang sebagai mobilisasi dan peningkatan kekuasaan dalam masyarakat maka akan mudah membedakan antara tujuan pembangunan dengan ciri-ciri yang biasanya dilekatkan pada pembangunan. Banyak dari ciri-ciri itu dapat diukur dan karenanya bisa disusun ukuran-ukuran pembangunan. Unsur-unsur dalam ukuran-ukuran itu bisa meliputi pengaruh dan penetrasi media massa yang diukur dari peredaran surat kabar dan penyebaran radio, basis perpajakan, perbandingan jumlah pegawai negeri dan penyebarannya dalam berbagai kategori kegiatan, perbandingan alokasi sumber daya dan dana yang disalurkan untuk pendidikan, pertahanan dan kesejahteraan sosial. Deutsch (1961) telah merumuskan indikator-indikator mobilisasi yang terperinci.

J. PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI SATU ASPEK PROSES PERUBAHAN SOSIAL YANG MULTIDIMENSIONAL

Kebutuhan nyata akan asumsi-asumsi teoritis sebagai pedoman pemilihan unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam indeks pengukur pembangunan erat hubungannya dengan segi-segi lain dari perubahan sosial dan ekonomi (Max F. Millikan dan Donald, 1961). Hal ini memang benar, sebab setiap unsur yang mungkin relevan dalam menjelaskan potensi kekuasaan suatu negara harus mencerminkan keadaan ekonomi dan ketertiban sosialnya. Mungkin bisa diajukan argumen bahwa tidak perlu dan tidak wajar berusaha memisahkan sama sekali pembangunan politik dari bentuk-bentuk pembangunan lainnya. Meskipun dalam batas-batas tertentu bidang politik dapat dipisahkan dari masyarakat, tetapi pembangunan politik hanya bisa berjalan dalam proses sosial yang multidimensional di mana tidak ada satu pun sektor masyarakat yang terlalu jauh tertinggal.

Menurut pandangan ini, semua bentuk pembangunan saling berkaitan dan banyak mempunyai persamaan dengan modernisasi, dan terjadi dalam konteks sejarah di mana pengaruh dari luar masyarakat berpengaruh pada proses-proses perubahan sosial, sebagaimana halnya perubahan-perubahan ekonomi, politik dan sosial saling mempengaruhi satu sama lain.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Buatlah uraian singkat mengenai pandangan bahwa pembangunan politik adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi!
- 2) Uraikan pandangan bahwa pembangunan politik adalah sebagai modernisasi politik dengan menunjukkan standard-standardnya!
- 3) Terangkan secara singkat pandangan bahwa pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum!
- 4) Uraikan secara singkat pandangan sebagian besar masyarakat bahwa pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa!
- 5) Terangkan hubungan antara pembangunan politik dengan demokrasi!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Para ahli ekonomi menunjukkan bahwa kondisi sosial dan politik bisa memainkan peranan penting dalam menghambat atau memperlancar peningkatan pendapatan per kapita. karena itu wajarlah bila pembangunan politik dipandang sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, keadaan masyarakat politik dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi. Ini berarti program-program pembangunan politik diarahkan untuk memungkinkan berjalannya pembangunan ekonomi (Anda masih bisa mengembangkan lebih lanjut jawaban ini).
- 2) Negara-negara industri maju adalah pencipta mode dan pelopor dalam hampir setiap kehidupan sosial dan ekonomi sehingga wajarlah jika banyak orang mengharapkan hal itu terjadi pula dalam bidang politik. Banyak standard-standard umum bagi kehidupan politik modern memang berasal dari pertumbuhan masyarakat industri, meskipun sebagian di antaranya telah memiliki dinamikanya sendiri. Standard-standard itu antara lain partisipasi massa, tuntutan akan hukum yang berlaku umum, penghormatan atas kemampuan dari pada keturunan dan sebagainya. (Silakan kembangkan lebih lanjut).

- 3) Teori-teori masa kini menyatakan bahwa pembinaan birokrasi yang efektif harus mendapatkan prioritas utama dalam proses pembangunan. Menurut pandangan ini pembangunan administrasi erat kaitannya dengan penyebaran rasionalitas, makin kuatnya konsep-konsep hukum sekuler, meningkatnya pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengaturan kehidupan manusia. Dengan demikian, tidak ada negara yang bisa disebut “maju” bila negara itu tidak memiliki kemampuan menangani masalah-masalah kemasyarakatan secara efektif. Biasanya di negara-negara tertentu memiliki lembaga-lembaga administratif yang mampu menangani banyak masalah. (Jawaban Anda masih bisa dikembangkan).
- 4) Pandangan bagian terbesar masyarakat, memang pembangunan politik mencakup perluasan partisipasi massa, tetapi perlu dibedakan kondisi-kondisi yang memungkinkan perluasan itu. Proses partisipasi massa ini dapat berarti penyebarluasan proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap pilihan dan keputusan (Anda masih bisa mengembangkan lebih lanjut jawaban ini).
- 5) Dalam pandangan banyak orang tersimpul anggapan bahwa pembangunan politik yang sungguh-sungguh bermakna adalah pembinaan demokrasi: Bahkan ada yang berpendapat bahwa pembangunan baru berarti bila dihubungkan dengan suatu ideologi (Silakan kembangkan jawaban Anda).



RANGKUMAN

Aneka ragam definisi pembangunan politik adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan politik sebagai tipe politik masyarakat industri.
3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik.
4. Pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa.
5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum.
6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa.
7. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.
8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.
9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan.

10. Pembangunan politik sebagai satu aspek proses perubahan sosial yang multidimensional.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Salah satu keberatan serius terhadap pandangan bahwa pembangunan politik sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi ialah ...
 - A. pertumbuhan ekonomi lebih cepat dari perkembangan politik.
 - B. kerangka dasar teorinya tidak bersandar pada asumsi-asumsi umum.
 - C. bidang kajiannya berbeda
 - D. bidang ekonomi lebih produktif dari pada bidang politik
- 2) Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berhubungan erat dengan pandangan bahwa:
 - A. pembangunan politik proses menuju masyarakat industri
 - B. pembangunan politik proses menuju modernisasi politik
 - C. pembangunan politik identik dengan modernisasi politik
 - D. pembangunan politik adalah ciri masyarakat industri
- 3) Salah satu prinsip dalam kehidupan politik modern adalah
 - A. pertumbuhan ekonomi yang tinggi
 - B. berkembangnya partisipasi massa
 - C. penguasaan teknologi tinggi
 - D. meningkatnya disiplin nasional
- 4) Dalam pandangan pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa, salah satu ukuran pembangunan politik adalah
 - A. pembentukan serangkaian lembaga-lembaga politik
 - B. penyusunan konstitusi negara
 - C. pembentukan lembaga swadaya masyarakat
 - D. penyusunan kabinet yang kuat
- 5) Dalam pandangan pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa maka yang dimaksud proses partisipasi massa adalah
 - A. penyebarluasan proses pengambilan keputusan
 - B. peningkatan kapabilitas sistem politik

- C. peningkatan pemerataan pendapatan
- D. pengembangan semangat nasionalisme

Untuk soal nomor 6-8, pilihlah :

- A. Jika (1) dan (2) benar
- B. Jika (1) dan (3) benar
- C. Jika (2) dan (3) benar
- D. Jika semuanya benar

- 6) Ada beberapa ciri khas pembangunan politik yang menjadi pola-pola tingkah laku pemerintahan rasional dan bertanggung jawab, yaitu
 - 1. kesadaran akan batas-batas kedaulatan politik
 - 2. penghargaan terhadap nilai-nilai administratif yang teratur
 - 3. pengakuan bahwa politik adalah mekanisme pemecahan masalah
- 7) Ada beberapa prinsip umum yang berasal dari pertumbuhan masyarakat industri, yaitu
 - 1. tuntutan akan hukum yang berlaku umum
 - 2. penghormatan atas kemampuan dari pada keturunan
 - 3. efektivitas dan efisiensi yang tinggi
- 8) Dalam garis besar, pembinaan bangsa dapat dibagi atas:
 - 1. pembinaan masyarakat ekonomi lemah
 - 2. pembinaan kelembagaan
 - 3. pembinaan kewarganegaraan

Untuk soal nomor 9-10, pilihlah

- A. Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat
 - B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat
 - C. Jika salah satu dari pernyataan tersebut salah
 - D. Jika kedua pernyataan salah.
- 9) Pembangunan politik seharusnya sama dengan usaha pembentukan lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi
sebab
pembangunan politik yang sungguh-sungguh bermakna adalah pembinaan demokrasi
- 10) Pembangunan politik sebagai stabilitas yang merupakan stagnasi dan dukungan status quo

sebab
stabilitas adalah salah satu unsur trilogi pembangunan nasional

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 3

Ciri-ciri Pembangunan Politik

Pada kegiatan belajar dua telah diuraikan sepuluh definisi pembangunan politik yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan oleh Lucian W. Pye (1966) bahwa ciri-ciri pembangunan politik, yaitu *equality* (persamaan), *capacity* (kapasitas), *differentiation and specialization* (diferensiasi dan spesialisasi). Ketiga ciri ini dapat dipandang sebagai inti dari proses pembangunan politik. Kita tidak mudah bisa menyatakan bahwa ketiga ciri itu cocok dan saling mengisi atau melengkapi, tetapi dalam kenyataannya kadang-kadang timbul kecenderungan pertentangan akan tuntutan persamaan, prasyarat-prasyarat kapasitas dan proses diferensiasi dan spesialisasi yang makin luas. Tuntutan ke arah persamaan yang besar dapat menjadi tantangan kapasitas sistem, dan diferensiasi serta spesialisasi bisa menurunkan persamaan karena perbedaan kualitas pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh warga negara. Misalnya, warga negara yang memiliki kualitas pengetahuan dan keahlian yang tinggi akan mampu bersaing untuk menduduki berbagai struktur yang ada dalam sistem politik, yang pada akhirnya muncul sebagai golongan elit dalam masyarakat. Sebaliknya bagi warga negara yang kurang mempunyai kualitas pengetahuan dan keahlian akan sulit bersaing menempati struktur sistem politik, meskipun ada persamaan kesempatan yang diberikan.

A. *EQUALITY* (PERSAMAAN)

Banyak pandangan tentang hal ini menunjukkan bahwa pembangunan politik menyangkut partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi massa bisa berbentuk demokratis atau mobilisasi totaliter, tetapi yang penting bahwa semua orang harus menjadi warga negara yang aktif.

Dalam kaitannya dengan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik (partisipasi politik), Huntington dan Nelson (1977) memandang bahwa partisipasi politik merupakan ciri utama dari modernisasi politik. Modernisasi pada bidang lain seperti ekonomi dan sosial dalam jangka panjang akan menghasilkan partisipasi politik yang lebih luas. Lebih lanjut

dinyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan warga negara secara pribadi atau kolektif, terorganisasi atau spontan, terus-menerus atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau tidak legal, efektif atau tidak efektif. Kegiatan-kegiatan warga negara tersebut merupakan kegiatan empirik yang dilakukan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian sifatnya bukan lagi perasaan, *idea* melainkan sudah tindakan nyata.

Kemudian Huntington dan Nelson (1977) membedakan antara *autonomous participation* (partisipasi yang bersifat otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasi). Tetapi sulit untuk menentukan ukuran-ukuran yang bisa memisahkan antara kedua tipe partisipasi politik tersebut di atas. Karena itu kedua tipe partisipasi politik tersebut hanya bisa dibedakan dalam konsep, tapi sulit dalam kenyataan empirik.

Selanjutnya kedua penulis tadi mengemukakan bahwa wujud partisipasi politik dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. *Electoral Activity*;

yaitu kegiatan pemilihan umum guna menentukan kepemimpinan nasional. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain pemberian suara, pemberian sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam pemilihan, mencari dukungan untuk seorang calon atau setiap kegiatan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.

2. *Lobbying*;

yakni meliputi usaha-usaha perseorangan atau kelompok untuk mengadakan hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya usaha untuk menumbuhkan dukungan terhadap keputusan administratif tertentu.

3. *Organizational Activity*;

Kegiatan ini menyangkut keikutsertaan anggota atau pimpinan dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

4. *Contacting;*

Mencari koneksi merupakan kegiatan perorangan yang ditujukan kepada pimpinan-pimpinan pemerintahan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pada seseorang atau sekelompok kecil anggota masyarakat.

5. *Violence;*

yakni suatu kegiatan dengan menggunakan cara kekerasan agar pemerintah terpengaruh. Pengaruh tersebut diharapkan akan menyebabkan pemerintah meninjau kembali atau mengubah keputusan-keputusan tertentu, misalnya melalui huru-hara, demonstrasi, pemberontakan dan sebagainya.

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat (Miriam Budiardjo, 1981). Di Indonesia, hal ini jelas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat “... *maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat...*”. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan atau kekuasaan politik tertinggi ada di tangan rakyat yang dijalankan menurut undang-undang dasar.

Di samping uraian di muka, *equality* (persamaan) juga berarti bahwa hukum harus bersifat universal, artinya berlaku umum untuk semua warga negara. Hal ini sejalan dengan makna Undang-Undang Dasar 1945, bahwa *tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan* itu dengan tidak ada kecualinya. Ini berarti pembinaan sistem hukum nasional dan prosedur-prosedur hukum haruslah jelas bagi seluruh warga negara.

Akhirnya, *equality* (persamaan) berarti pula proses rekrutmen politik atau seleksi pemimpin berdasarkan pada kemampuan atau prestasi kerja bukan atas dasar ikatan-ikatan primordial seperti ikatan keluarga, daerah dan sebagainya. Juga tidak atas dasar pertimbangan status yang bersandar pada sistem sosial tradisional. Karena itu pelaksanaan rekrutmen politik hendaknya terbuka bagi semua warga negara. Rekrutmen politik yang

terbuka berarti setiap warga negara memperoleh peluang-peluang yang sama untuk bersaing menduduki jabatan-jabatan politik dan pemerintahan. Di samping itu, ada pula rekrutmen politik tertutup. Di sini tidak semua warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk bersaing memperebutkan jabatan-jabatan politik dan pemerintahan, tetapi hanya orang-orang tertentu saja. Biasanya orang-orang tersebut ada hubungannya dengan penguasa atas dasar ikatan-ikatan primordial. Hal ini tidak sesuai makna persamaan sebagai ciri pembangunan politik.

B. CAPACITY (KAPASITAS)

Yang dimaksudkan kapasitas di sini adalah kemampuan sistem politik, yaitu mengenai output (hasil) sistem politik yang mampu mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Juga berkaitan kondisi dan prestasi pemerintah yang menyebabkan proses pelaksanaan kebijaksanaan umum menjadi efektif dan efisien. Akhirnya kapasitas sistem politik berhubungan pula dengan rasionalisasi administrasi dan orientasi sekuler terhadap kebijaksanaan umum.

Mengenai kemampuan-kemampuan yang dimiliki sistem politik, menurut Almond dan Powell (1966) terdapat enam jenis, yaitu:

1. *The Extractive Capability*

Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik mengelola sumber-sumber kekayaan alam dan potensi-potensi manusia (*material and human resources*). Melalui sumber-sumber ini, sudah bisa diduga segala kemungkinan dan tujuan apa saja yang dapat diwujudkan oleh sistem politik. Kehidupan sistem politik sangat tergantung pada biaya yang dapat dikumpulkan dari kemampuan ekstraktif ini.

Manusia (warga negara) akan memperoleh manfaat untuk membiayai kehidupannya melalui pengelolaan sumber daya alam dan negara juga memperoleh sumber pembiayaan melalui berbagai cara antara lain pembayaran pajak. Pengelolaan kekayaan alam hendaknya berdasarkan asas-asas berikut: (a) *asas maksimal*, artinya kekayaan alam harus memberi manfaat maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (b) *asas lestari*, maksudnya bahwa sumber kekayaan alam harus dipelihara kelestariannya agar dapat dimanfaatkan selama mungkin; (c) *asas daya saing*, artinya kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan kita

terhadap negara lain. Sedangkan sumber daya manusia dikembangkan agar bisa ikut serta dalam proses pembangunan bangsa sesuai pendidikan, keahlian dan keterampilan masing-masing.

2. *The Distributive Capability*

Kemampuan distributif berkaitan erat dengan kemampuan ekstraktif, sebab sesudah sistem politik mengelola sumber-sumber alam dan potensi manusia maka harus pula menunjukkan kemampuannya mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Distribusi barang-barang, jasa, kesempatan, status dan bahkan juga kehormatan dapat dipandang sebagai prestasi nyata sistem politik. Distribusi tersebut ditujukan kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada hakikatnya apa yang harus didistribusikan bukan saja keuntungan-keuntungan, tetapi juga kerugian-kerugian, misalnya pendapatan negara (nasional) melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) didistribusikan untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tetapi bila negara dalam keadaan kritis, misalnya menghadapi perang maka hal ini juga harus didistribusikan. Artinya setiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam pembelaan negara.

3. *The Regulative Capability*

Kemampuan regulatif dimaksudkan bagaimana sistem politik menyelenggarakan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya. Termasuk penempatan kekuatan-kekuatan yang absah untuk melakukan pengawasan terhadap tingkah laku manusia dan badan lain yang berada dalam sistem.

Bagaimana cara sistem politik membawa kelompok-kelompok atau masyarakat kepada aturan-aturan yang berlaku, misalnya bagaimana cara mereka menanggapi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ideologi nasional dan sebagainya. Sejauh mana kekuatan aturan-aturan tersebut menjangkau dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta bagaimana intensitas campur tangan sistem politik terhadapnya, semuanya merupakan ukuran dari kemampuan regulatif. Misalnya dalam kehidupan ekonomi terjadi monopoli maka sistem politik harus menunjukkan kemampuan regulatifnya agar masyarakat tidak terkena gejala harga yang disebabkan monopoli itu. Sistem juga harus mampu mencegah agar

pengusaha bebas dari praktek ekonomi yang curang dan membina persaingan yang sehat.

4. *The Responsive Capability*

Kemampuan responsif adalah kemampuan daya tanggap sistem politik yang ditentukan oleh hubungan antara *input* (aspirasi masyarakat) dengan *output* (kebijakan pemerintah). Dalam perkembangannya, suatu sistem politik sering menghadapi tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang datang dari lingkungan dalam ataupun lingkungan luar. Pertanyaan yang timbul ialah kepada siapa sistem politik bersifat tanggap?, Dalam bidang kebijakan apa sistem politik tanggap?, Bagaimana cara melaksanakan pola tingkah laku yang tanggap itu?

Dalam sistem kerajaan, di mana aktivitas birokrasi pemerintahan dikendalikan oleh raja bersama para pembantunya yang terdekat, hanya sedikit melibatkan diri terhadap tuntutan-tuntutan dari luar. Elit politik hampir selalu terikat pada satu sumber input sehingga kemampuan responsif semacam ini dianggap rendah.

Sebaliknya, pada sistem politik yang terbuka luas terhadap pengaruh *input* dari kelompok-kelompok kepentingan atau partai politik, di mana kebijaksanaan elitnya peka dan tanggap, bisa dipandang kemampuan responsifnya tinggi.

5. *The Symbolic Capability*

Kemampuan simbolik adalah mengalirnya secara efektif simbol-simbol nasional dari sistem politik ke dalam lingkungan dalam dan lingkungan luar sistem. Misalnya simbol-simbol persatuan nasional seperti bendera nasional, lagu kebangsaan, lambang negara, bahasa nasional, Pancasila dan sebagainya yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Masyarakat Indonesia yang heterogen terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat, agama, aliran dan sebagainya telah dapat dipersatukan melalui ideologi nasional yakni Pancasila. Telah berulang kali negara kesatuan Republik Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi tetapi tetap dapat diatasi dengan menggunakan Pancasila sebagai ideologi nasional.

6. *Domestic and International Capability*

Kemampuan domestik dan internasional menunjukkan keberadaan sistem politik dalam lingkungan domestik (dalam negeri) maupun lingkungan

internasional (luar negeri). Sistem politik dalam bekerja, mengadakan hubungan atau interaksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Karena itu tingkah laku internasional suatu sistem politik bisa dilihat dari segi kemampuan ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik dan responsif internasional sistem politik bersangkutan, misalnya kemampuan ekstraktif internasional suatu sistem politik dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh dalam perdagangan internasional, keuntungan dari penanaman modal di negara lain dan sebagainya.

C. DIFFERENTIATION AND SPECIALIZATION

Ciri pembangunan politik ini berkaitan dengan analisis tentang struktur dan fungsi. Dengan demikian pembangunan politik pertama-tama mengenai diferensiasi dan spesialisasi struktur. Lembaga-lembaga pemerintahan masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terdapat pembagian kerja di dalamnya.

Diferensiasi dapat menimbulkan peningkatan spesialisasi fungsional dari berbagai peranan lembaga-lembaga politik dalam sistem politik. Juga diferensiasi menyangkut integrasi dari struktur dan proses politik. Dengan demikian diferensiasi bukanlah fragmentasi dan isolasi masing-masing bagian dari sistem, melainkan spesialisasi berdasarkan pemahaman kesatuan yang menyeluruh.

Struktur politik terdiri dari lembaga-lembaga politik baik yang ada dalam masyarakat yang disebut sebagai infra struktur politik maupun yang ada dalam pemerintahan disebut supra struktur politik. Sedangkan proses politik adalah interaksi atau pengaruh timbal balik dari lembaga-lembaga politik yang ada dalam sistem politik. Infra struktur politik dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, serikat buruh, organisasi pemuda, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, dan sebagainya. Sedangkan supra struktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Di Indonesia misalnya MPR, DPR, DPD, Kepresidenan, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga-lembaga lain yang dikelola pemerintah.

Infra struktur politik antara lain berfungsi merumuskan segala kepentingan masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada lembaga-

lembaga supra struktur politik. Selanjutnya lembaga supra struktur politik memproses segala kepentingan itu untuk menetapkan satu keputusan bersama. Tetapi proses kegiatan yang dilaksanakan supra struktur politik pada hakikatnya berdasarkan aspirasi, dukungan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Lebih lanjut lembaga supra struktur politik berfungsi mengalokasikan kembali nilai-nilai keputusan bersama itu kepada masyarakat. Nilai keputusan bersama inilah dipandang sebagai nilai-nilai otoritatif, artinya nilai-nilai yang berada dalam wewenang pemerintah. Karena itu infra struktur politik mempunyai hubungan yang erat dengan supra struktur politik. Proses kerja keduanya saling berhubungan, kohesif dan interdependensi sehingga totalitas sistem bisa terpelihara untuk keberlangsungannya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Salah satu makna *equality* (persamaan) adalah berkaitan dengan masalah partisipasi massa. Uraikan dasar pemikiran partisipasi politik di negara-negara demokratis khususnya Indonesia!
- 2) *Equality* juga berarti bahwa hukum harus bersifat universal. Terangkan maksudnya dan bagaimana di Indonesia!
- 3) *Equality* bermakna pula sebagai proses rekrutmen politik, terangkan maksudnya!
- 4) Salah satu kemampuan yang dimiliki sistem politik ialah kemampuan ekstraktif, yaitu kemampuan sistem politik mengelola sumber-sumber kekayaan alam dan potensi manusia. Uraikan asas -asas pengelolaan kekayaan alam di Indonesia!
- 5) Diferensiasi dan spesialisasi berkaitan dengan analisis tentang struktur dan fungsi. Struktur politik terdiri dari infra struktur politik dan supra struktur politik. Uraikan interaksi kedua struktur politik tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Dasar pemikiran partisipasi politik di negara-negara demokratis adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat (Jawaban ini Anda bisa kembangkan dengan mengambil contoh di Indonesia).
- 2) Hukum haruslah bersifat universal, maksudnya hukum berlaku umum untuk semua warga negara. Hal ini sejalan dengan makna Undang-Undang Dasar 1945 (Silakan Anda kembangkan jawaban ini).
- 3) *Equality* (persamaan) dalam kaitannya rekrutmen politik berarti seleksi pemimpin berdasarkan pada kemampuan atau prestasi kerja bukan atas dasar ikatan-ikatan primordial (Silakan Anda kembangkan jawaban ini).
- 4) Asas -asas pengelolaan kekayaan alam di Indonesia berdasarkan asas maksimal, asas lestari dan asas berdaya saing. (Jawaban ini anda bisa uraikan dan kembangkan).
- 5) Infra struktur politik berada pada sektor kehidupan politik masyarakat yang melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan supra struktur politik berada pada sektor pemerintahan yang melakukan perumusan, pelaksanaan dan penghakiman kebijaksanaan (Jawaban ini anda bisa kembangkan dengan memberikan contoh di Indonesia).

**RANGKUMAN**

1. *Equality* (persamaan) berkaitan mengenai partisipasi massa, hukum yang bersifat universal dan proses rekrutmen.
2. *Capacity* (kapasitas) menunjuk pada kemampuan sistem politik yang meliputi kemampuan ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif serta kemampuan domestik dan internasional.
3. Diferensiasi dan spesialisasi, berkaitan dengan analisis tentang struktur dan fungsi sistem politik.

TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Makna *equality* (persamaan) berkaitan dengan masalah
 - A. pembinaan aparatatur negara
 - B. partisipasi massa
 - C. mobilisasi massa
 - D. pembebasan tahanan perang

- 2) Salah satu wujud partisipasi massa ialah partisipasi politik yang bermaksud mempengaruhi
 - A. pengambilan keputusan pemerintah
 - B. kewibawaan pemerintah
 - C. produktivitas masyarakat
 - D. aspirasi masyarakat

- 3) Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah kedaulatan
 - A. hukum
 - B. politik
 - C. rakyat
 - D. tunggal

- 4) Kemampuan ekstraktif suatu sistem politik adalah kemampuan
 - A. menyelenggarakan pemerintahan
 - B. mengelola kekayaan alam dan potensi manusia
 - C. menata perdagangan internasional
 - D. mengembangkan ekonomi rakyat

- 5) Diferensiasi dan spesialisasi berhubungan dengan analisis
 - A. struktur dan fungsi
 - B. perbandingan sejarah
 - C. penggolongan tugas
 - D. produksi dan distribusi

Untuk soal nomor 6-8, pilihlah:

- A. Jika (1) dan (2) benar
- B. Jika (1) dan (3) benar
- C. Jika (2) dan (3) benar
- D. Jika semuanya benar

- 6) Ciri-ciri utama pembangunan politik adalah
1. keterbukaan
 2. persamaan
 3. kapasitas
- 7) *Equality* (persamaan) adalah berhubungan dengan hal-hal berikut
1. partisipasi massa
 2. rekrutmen
 3. komunikasi
- 8) Wujud partisipasi politik dalam berbagai bentuk, yaitu
1. ikut kegiatan pemilihan umum
 2. ikut kegiatan bakti sosial
 3. ikut kegiatan dengan cara kekerasan

Untuk soal nomor 9-10, pilihlah:

- A. Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat
- B. Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat
- C. Jika salah satu dari pernyataan tersebut salah
- D. Jika kedua pernyataan salah
- 9) Diferensiasi dan spesialisasi berkaitan dengan analisis tentang struktur dan fungsi
- sebab
- diferensiasi dapat menimbulkan peningkatan spesialisasi fungsional dari peranan lembaga-lembaga politik
- 10) Infra struktur politik seperti kelompok kepentingan dan partai politik melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat
- sebab
- mereka bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan sebagai output sistem politik.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B Modernisasi
Karena dalam studi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik, yaitu perubahan, pembangunan dan modernisasi politik.
- 2) C Progresif
Karena perubahan politik itu menuju situasi yang lebih baik.
- 3) B Usaha berencana
Karena pembangunan dilaksanakan dengan sasaran relatif jelas, prosesnya bertahap dan tidak terdapat kekerasan.
- 4) A Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan.
- 5) A. Bisa menggunakan konsep dan metoda yang telah digunakan negara maju.
- 6) D Obyek studi perubahan politik meliputi nilai-nilai politik, struktur kekuasaan dan strategi kebijakan umum.
- 7) C Demokrasi dan stabilitas.
- 8) D. Keadilan sosial, supremasi hukum, demokrasi.
- 9) A Kedua pernyataan benar dan saling berhubungan. Pembangunan politik memang dapat diartikan sebagai implikasi politik dari pembangunan nasional.
- 10) C Salah satu dari pernyataan tersebut salah. Karena sistem politik ideal memungkinkan dapat dicapai tanpa melalui gerakan radikal.

Tes Formatif 2

- 1) D Kualitas adalah jawabnya, sebab kualitas pemimpin biasanya lebih baik dari yang dipimpin. Sedangkan nilai, sikap, dan minat perlu sama dalam usaha mencapai tujuan bersama.
- 2) C Pembangunan politik identik dengan modernisasi politik. Negara-negara industri maju adalah pencipta mode dan pelopor dalam hampir setiap kehidupan sosial dan ekonomi sehingga wajarlah diharapkan pula terjadi dalam dunia politik.
- 3) B Berkembangnya partisipasi massa.
- 4) A Pembentukan serangkaian lembaga-lembaga politik.

- 5) A. Penyebarluasan proses pengambilan keputusan
- 6) D Ciri khas pembangunan politik yang menjadi pola-pola tingkah laku pemerintahan rasional dan bertanggung jawab meliputi kesadaran akan batas-batas kedaulatan rakyat, penghargaan terhadap nilai-nilai administratif yang teratur dan pengakuan bahwa politik adalah mekanisme pemecahan masalah.
- 7) A Tuntutan akan hukum yang berlaku umum dan penghormatan atas kemampuan daripada keturunan.
- 8) C Pembinaan kelembagaan dan pembinaan kewarganegaraan.
- 9) A. Kedua pernyataan benar dan saling berhubungan. Karena pembentukan lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi akan bermakna pembinaan demokrasi.
- 10) C Salah satu pernyataan salah. Stabilitas tidak diartikan sebagai stagnasi dan dukungan status quo.

Tes Formatif 3

- 1) B Partisipasi massa, bisa berbentuk demokratis atau mobilisasi totaliter, tetapi yang penting bahwa semua orang harus menjadi warga negara yang aktif.
- 2) A Pengambilan keputusan pemerintah.
- 3) C Kedaulatan rakyat.
Karena di negara-negara demokratis, setiap warga negara memperoleh peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem politiknya.
- 4) B Mengelola kekayaan alam dan potensi manusia.
- 5) A Struktur dan fungsi.
- 6) C Persamaan dan kapasitas.
- 7) A Partisipasi massa dan rekrutmen.
- 8) B Wujud partisipasi politik dapat berbentuk ikut kegiatan pemilihan umum atau kegiatan dengan cara kekerasan.
- 9) A Kedua pernyataan benar dan ada hubungannya. Memang diferensiasi dan spesialisasi berkaitan dengan analisis struktural dan fungsional yang dapat menimbulkan peningkatan spesialisasi fungsional peranan lembaga-lembaga politik.
- 10) C Salah satu pernyataan tersebut salah. Bukan infrastruktur politik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijaksanaan sebagai output sistem politik.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A and G. Bingham Powell Jr. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little Brown and Company.
- Budiardjo, Miriam. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Gaffar, Afan. (1989). *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Huntington, Samuel P and Joan M. Nelson. (1977). *No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Muhaimin, Yahya and Colin MacAndrews. (1988). *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*. Gadjah Mada University Press.
- Pye, Lucian W.. (1966). *Aspects of Political Development*. Boston Little Brown and Company.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. (1996). *Pembangunan Politik: Bercermin Pada Masa Lampau Menuju Masa Depan*, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis XLVI Universitas Indonesia.
- Sudarsono, Juwono. (1985). *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2002). *Persandingan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia, No. 31 Tahun 2002, Tentang Partai Politik, (2003), Citra Umbara, Bandung.